

Produksi Ruang Sosial Pedagang Kaki Lima di Lapangan Niti Mandala Renon Denpasar

Ni Nyoman Tirta Yamuna ¹⁾, I Nengah Punia ²⁾, Ni Made Anggita Sastri Mahadewi ³⁾

^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosian dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: tirtayamuna25@gmail.com¹⁾, nengah_puniah@yahoo.com²⁾,
snimadeanggita@yahoo.com³⁾

ABSTRACT

Street Vendors (PKL) in the Renon Field often receive control from the government. This makes interest to know how PKL in producing social space, the obstacles encountered, and to know the implications of the activities of PKL in their social space. This study found that the PKL social space production at the Renon Field was formed by the process of socializing, interacting, and forming a space zone. The stronger interaction then forms power. Constraints faced by PKL in producing their social space, namely the location permit, the small number of visitors, relatively small capitalization, competition among other traders.

Keywords: *Street vendors (PKL), social space production*

1. PENDAHULUAN

Keberadaan pedagang kaki lima di Kota Denpasar telah menjadi permasalahan yang tidak pernah ada habisnya untuk dibahas. Permasalahan mengenai pedagang kaki lima dari dulu hingga sekarang selalu menimbulkan pro-kontra di masyarakat maupun di aparat penegak hukum. Kota Denpasar merupakan kota yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Jamaludin (2015: 279) mengungkapkan peningkatan jumlah penduduk di perkotaan yang semakin tinggi tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja, terutama pada sektor formal mengakibatkan penduduk mencari alternatif pekerjaan lain dan sektor informal menjadi salah satu alternatif penyediaan lapangan kerja di perkotaan.

Pedagang kaki lima merupakan para pekerja di sektor informal yang banyak ditemui di perkotaan. Secara definitif,

pedagang kaki lima adalah pedagang yang menggunakan bahu jalan atau trotoar sebagai tempat untuk berdagang (Dwiyanti, 2005: 33). Terdapat beberapa ruang publik di Kota Denpasar yang menjadi lokasi pedagang kaki lima dalam menjajakan dagangan, lokasi tersebut diantaranya yaitu di ruas Jalan Gajah Mada, Jalan Thamrin, Lapangan Niti Mandala Renon, Lapangan Puputan Badung, dan Lapangan Lumintang. Dari lokasi-lokasi tersebut, terdapat 3 (tiga) lokasi utama yang banyak terdapat PKL yaitu di Lapangan Niti Mandala Renon, Lapangan Puputan Badung dan Lapangan Lumintang. Ketiga lokasi tersebut merupakan ruang terbuka hijau kota.

Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa jumlah PKL di Lapangan Niti Mandala Renon paling banyak dibandingkan dengan ruang publik lainnya di Kota Denpasar.

Sehingga Lapangan Niti Mandala Renon dipilih sebagai lokasi penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara PKL dalam memproduksi ruang sosial, kemudian mengetahui kendala yang di hadapi, dan mengetahui implikasi dari adanya aktivitas PKL.

2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan teori produksi ruang sosial dari Henri Lefebvre. Pemilihan teori ini didasarkan pada fokus penelitian yang berupaya mengkaji mengenai pemanfaatan ruang publik perkotaan oleh PKL sebagai bentuk produksi terhadap ruang sosial kota. Menurut Lefebvre ruang secara fundamental terikat oleh realitas sosial (Lefebvre, 1991: 68). Konsep ruang sosial menurut Lefebvre diartikan sebagai ruang abstrak yang secara aktual menggantikan ruang historis. Ruang abstrak adalah ruang represif yang dapat terkontrol, diduduki, dan didominasi. Lebih jauh Lefebvre menekankan pada apa yang dimaksud “ruang abstrak adalah alat kekuasaan” yakni, bukan hanya kekuasaan yang dijalankan di dalamnya, ruang abstrak itu sendiri adalah kekuasaan (Ritzer, 2014: 204).

Henri Lavebvre menjelaskan ruang sebagai entitas abstrak yang terus di produksi oleh kapitalisme (Setiawan, 2016: 46). Kekuatan modal menentukan rancangan dan peruntukan ruang-ruang baru sesuai kepentingannya. Ruang tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang konkret yang menghadirkan realita manusia penghuninya, akan tetapi dilihat sebatas sebagai rancangan atau gagasan

ideal dengan membawa kepentingan modal di belakangnya. Lefebvre juga merinci beberapa konradiksi yang menyertai berkembangnya ruang-ruang abstrak produk kapitalis ini, salah satunya hilangnya ruang-ruang bersama yang dikuasai oleh hak milik (*private property*). Akibatnya yaitu hilangnya ruang-ruang komunal yang sarat dengan aktivitas sosial berganti ke ruang-ruang privat yang sarat dengan kepentingan modal di belakang untuk bisa mengaksesnya.

Lebih jauh Lefebvre melihat ruang abstrak adalah alat kekuasaan, sementara pihak yang berkuasa selalu berusaha “mengontrol ruang secara menyeluruh” (Ritzer, 2014: 204). Dengan kata lain, kelas penguasa menggunakan ruang abstrak sebagai alat kekuasaan untuk mendapatkan kontrol atas ruang yang semakin meluas. Produksi ruang sosial menurut Lefebvre berkaitan erat dengan kepentingan subyek yang berusaha menguasai suatu ruang dan menandainya dengan memberikan makna berdasarkan kepentingan mereka (Chandra, 2016: 15). Produksi ruang sosial yang dimaksud Lefebvre menyangkut 2 (dua) hal yaitu ruang konkrit dan ruang abstrak. Ruang abstrak yang dimaksudkan adalah ketika para subyek yang ingin memproduksi ruang bermain di ranah ide dan pemberian makna pada suatu ruang, sedangkan ruang konkrit yang dimaksud Lefebvre adalah realisasi ide dan pemaknaan yang dilakukan dengan aktivitas-aktivitas sosial yang dilakukan secara terus menerus. Hal ini yang dilakukan oleh PKL di Kota Denpasar melalui ruang konkrit berusaha untuk memproduksi ruang

sosialnya dengan cara melakukan aktivitas perdagangan secara terus menerus. Menurut (Lafebvre, 1991: 33) memberikan asumsi mengenai konsep triadik atas produksi ruang, yaitu sebagai berikut:

1. Praktek spasial (*special space*). Konsep ini mengacu pada dimensi material dari kegiatan sosial dan interaksinya. Secara konkrit, praktik spasial merupakan jaringan interaksi dan komunikasi yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.
2. Representasi ruang (*representation of space*). Representasi ruang memberikan gambaran atau konseptualisasi sehingga sesuatu didefinisikan sebagai ruang. Representasi ruang merupakan ranah ruang abstrak, muncul pada tingkat wacana, muncul dalam bentuk yang diucapkan, misalnya deskripsi, definisi, dan terutama teori ruang.
3. Ruang representasi (*representational space*). Ruang representasi adalah ruang yang menyangkut dimensi simbolik ruang. Ruang representasi tidak mengacu pada ruang itu sendiri, tetapi pada hal lain yang memberikan makna mengenai ruang tersebut.

Ranah produksi ruang sosial menurut Lafebvre suatu ruang dapat mencakup salah satu di antara ketiga dimensinya, namun tidak menutup kemungkinan suatu ruang dapat berada pada ketiga dimensi tersebut. Fenomena PKL mengacu pada praktek spasial yang secara konkrit merupakan jaringan interaksi dan komunikasi yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Ruang terbentuk oleh manusia dan kegiatan di dalamnya, sedangkan manusia dan

kegiatannya juga dibentuk oleh ruang tersebut. Dalam konteks ini, PKL melalui aktivitas perdagangan yang dilakukan di Lapangan Niti Mandala Renon berusaha membentuk ruang yang diharapkannya. Ruang itu sendiri tercipta menurut cara kehidupan sosial manusia tinggal di dalamnya dan kehidupan sosial tersebut bersinggungan dengan aspek material fisik dan aspek non-material dari ruang yang terkonsepsikan.

3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-eksplanatif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif berupa narasi dan data kuantitatif berupa angka-angka. Data tersebut mengenai berbagai informasi pedagang kaki lima dalam bentuk tulisan, rekaman, maupun gambar yang diperoleh dari informan. Informan ditentukan menjadi tiga, yaitu informan kunci, informan utama, dan informan pelengkap. Informan kunci yaitu orang yang mengetahui secara jelas dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti, sehingga sebagai informan kunci dipilih beberapa PKL di lokasi penelitian. Informan utama yaitu pihak tertentu yang mengetahui permasalahan secara umum, sehingga sebagai informan utama dipilih pihak Satpol PP yang melakukan tugas penertiban. Selanjutnya informan pelengkap adalah orang yang dapat memberikan informasi tambahan mengenai permasalahan yang diteliti, dalam penelitian ini informan pelengkap yang dipilih peneliti yaitu masyarakat pengunjung lokasi penelitian dengan kriteria berusia 17-70 tahun

dan beraktivitas di lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan peneliti sebagai instrumen utama dengan dibantu pedoman wawancara, alat perekam suara, kamera, dan alat tulis.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada informan yang telah dipilih dan pihak lainnya yang dapat memberikan kelengkapan informasi. Keseluruhan data yang didapatkan didokumentasikan sebagai bahan analisis. Keseluruhan data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mereduksi melalui tahapan penyederhanaan dan transformasi. Setiap data di periksa kembali dan dilakukan kategorisasi. Keseluruhan data kemudian disajikan secara terstruktur dan dikaitkan dengan kajian teori yang telah dilakukan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Produksi ruang PKL di Lapangan Niti Mandala Renon terbentuk dari adanya proses bersosialisasi, interaksi, hingga terbentuknya zona ruang. Proses bersosialisasi pada awalnya dilakukan oleh sesama PKL. Sosialisasi tersebut kemudian berlangsung secara intensif dan terus menerus sehingga terbentuklah interaksi yang kuat antar sesama PKL. Interaksi yang kuat tersebut terlihat dari adanya pembauran antar pedagang PKL dan rasa saling menjaga dari kejaran petugas Satpol PP. Para PKL akan memberikan arahan kepada pedagang PKL lainnya saat adanya penertiban dari petugas Satpol PP. Terbentuknya rasa kekeluargaan antar pedagang PKL untuk ikut menyelamatkan diri. Interaksi yang kuat

tersebut kemudian membentuk zona ruang PKL. Hal tersebut sesuai dengan yang disebutkan oleh Lefebvre bahwa produksi dimulai dari interaksi sosial, kemudian interaksi, hingga terbentuklah zona ruang yang dapat dikonsumsi bersama (Ritzer, 2014: 204).

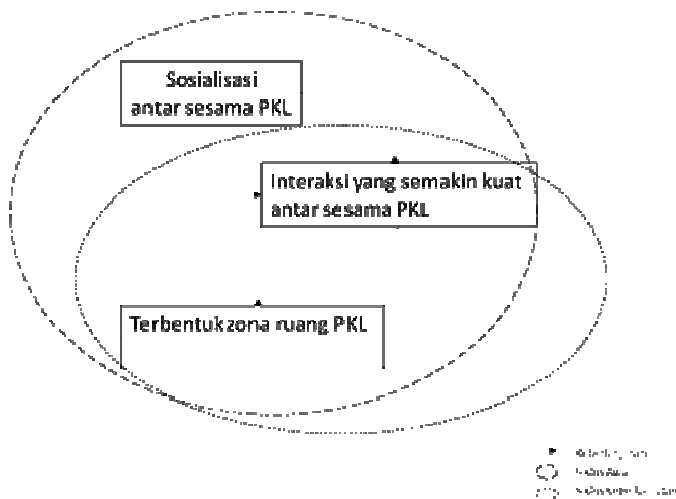
Zona ruang PKL sebagai hasil dari produksi ruang tersebut semakin kuat hingga membentuk kekuasaan (*power*) tersendiri. Kekuasaan yang dimaksudkan adalah kekuatan atas penguasaan ruang di Lapangan Niti Mandala Renon. Kekuatan penguasaan ruang di Lapangan Niti Mandala Renon disebabkan oleh adanya interaksi yang semakin kuat antar PKL walaupun terlihat abstrak, namun kekuatan penguasaan ruang oleh PKL tersebut ada dan terlihat dari semakin kerasnya usaha pemerintah (dalam hal ini adalah Satpol PP) untuk menertibkan para PKL. Hal ini juga sesuai dengan penjelasan yang dilontarkan oleh Lefebvre bahwa ruang abstrak itu sendiri adalah kekuasaan (Ritzer, 2014: 204).

Kekuatan penguasaan Lapangan Niti Mandala Renon oleh para PKL tidak hanya berasal dari sesama pedagang PKL, namun juga dari masyarakat yang dominan merasa suasana Lapangan Niti Mandala Renon lebih hidup dengan keberadaan para PKL. Penguasaan ruang yang abstrak dari para PKL tersebut nampaknya berhasil mengalahkan kekuasaan pemerintah. Hal tersebut terlihat dari diberikannya ruang khusus untuk para PKL berjualan di bagian selatan, tepatnya di sepanjang jalan DR. Muwardi selama kegiatan *car free day* di hari minggu, dari jam 06.00-10.00 WITA.

Walaupun hanya pada waktu tertentu saja, namun apa yang disebut sebagai “penguasaan ruang abstrak oleh para PKL” sudah mulai nampak dan bahkan menyaingi kekuasaan pemerintah. Ambrose (2003) mengungkapkan bahwa terdapat tiga kekuatan utama dalam suatu negara yakni, Pemerintah, Rakyat, dan Pebisnis. Lebih lanjut ambrose menyatakan bahwa ketiga kekuatan tersebut harus berimbang, jika pemerintah lebih mendominasi maka menjadi konservatif, jika masyarakat lebih mendominasi maka menjadi radikal, jika pebisnis lebih mendominasi maka menjadi kapitalis. Proses produksi ruang PKL di Lapangan Niti Manda Renon tergambar pada Gambar. 4.5.

Berfokus pada produksi ruang PKL di Lapangan Niti Mandala Renon, secara konsep terdapat dua dimensi yang membentuk produksi ruang PKL. Pertama, yakni sosialisasi dan interaksi antar sesama PKL hingga interaksi dengan pihak diluar sesama PKL. Kedua, Lapangan Niti Mandala Renon sebagai ruang mencari nafkah. Dikarenakan banyaknya aktivitas yang terjadi di lapangan tersebut, sehingga memunculkan representasi Lapangan Niti Manda Renon sebagai ruang mencari nafkah. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Lavebvre (1991:33) yang mengungkapkan terdapat suatu konsep triadik dalam produksi ruang, yakni praktik spasial (*spatial practice*), representasi ruang (*representations of space*), dan ruang representasi (*representational spaces*). Lebih lanjut dijelaskan bahwa suatu ruang berada pada salah satu diantara ketiga dimensi tersebut, namun tidak menutup

kemungkinan suatu ruang dapat berada di ketiga dimensi tersebut. Produksi ruang di Lapangan Niti Manda Renon berupa pada dimensi praktik spasial (*spatial practice*) dan representasi ruang (*representations of space*).



Gambar 1 Proses Produksi Ruang Sosial PKL di Lapangan Niti Mandala Renon

Sumber: Analisis Penulis, 2019.

Kemunculan PKL di Kawasan Lapangan Niti Mandala Renon terbentuk akibat kurangnya intensitas lahan produktif yang menguntungkan secara ekonomis bagi para pedagang kaki lima. Para PKL cenderung memilih ruang terbuka publik sebagai tempat berjualan karena biasanya para PKL tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk sewa tempat dan juga ruang publik dianggap sebagai lahan yang produktif bagi PKL untuk mencari nafkah. Permasalahan umum yang dihadapi PKL adalah tidak adanya perlindungan secara hukum, hal ini karena lemahnya posisi PKL di mata hukum yang menyebabkan sering dilakukannya penertiban. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan PKL, terdapat

beberapa kendala yang sering dihadapi PKL dalam melakukan aktivitas berjualan, salah satunya adalah masalah ijin tempat dan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP.

Adanya penertiban yang dilakukan oleh petugas Satpol PP di Kawasan Lapangan Niti Mandala Renon mau tidak mau membuat para PKL harus selalu waspada dengan keadaan di sekelilingnya, hal ini terbukti dengan kondisi yang peneliti lihat secara langsung di lapangan saat melakukan wawancara dengan para PKL, dimana para PKL saat dilakukan wawancara jarang melakukan kontak mata dengan peneliti, para PKL lebih cenderung memantau kondisi disekeliling tempatnya berjualan karena petugas Satpol PP bisa kapan saja datang dan melakukan penertiban terhadap para PKL.

Kawasan perdagangan mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sosial. Sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sosial kawasan perdagangan merupakan tempat dimana bertemunya produsen dengan konsumen yang memungkinkan adanya interaksi di dalamnya. Bentuk interaksi yang dilakukan dapat berupa interaksi secara langsung maupun tidak langsung seperti melalui perantara teknologi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum, Pasal 22 ayat 1 dan 2, setiap PKL dilarang berjualan di jalan, trotoar dan dibantaran sungai. Kemudian setiap PKL dilarang berjualan di jalur hijau, taman kota dan tempat umum

lainnya kecuali diizinkan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Keberadaan ruang publik tidak pernah terlepas dari kehadiran PKL yang selalu memenuhi setiap sudut ruang publik. Lapangan Niti Mandala Renon merupakan ruang publik yang berfungsi sebagai tempat bagi masyarakat umum melakukan aktivitas di pagi hari maupun sore hari. Keberadaannya sebagai ruang publik membuat Lapangan Niti Mandala Renon tidak pernah sepi pengunjung. Kondisi ini menarik minat para PKL untuk menjadikan Lapangan Niti Mandala Renon sebagai lokasi berjualan. Bagi para PKL lokasi berjualan menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan besarnya pendapatan yang akan diperoleh. Oleh sebab itu para PKL memilih tempat-tempat yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat seperti halnya pinggir jalan, trotoar, taman kota dan ruang publik lainnya. Kehadiran pengunjung mempunyai pengaruh terhadap pendapatan para PKL. Pembangunan suatu tempat perdagangan sangat tergantung pada penentuan lokasi, sehingga aktivitas sektor informal muncul di lokasi-lokasi strategis dimana terdapat tingkat kunjungan yang tinggi oleh karena itu kegiatan perdagangan sektor informal cenderung hadir di lokasi-lokasi keramaian seperti pada kawasan perkantoran, perumahan, maupun lokasi-lokasi strategis lainnya. Penggunaan ruang kota bagi aktivitas PKL tidak terlepas dari adanya keberadaan sektor formal di suatu lokasi, artinya bahwa kegiatan sektor formal dengan sektor informal saling terkait satu sama lain. Pada umumnya PKL cenderung

berlokasi secara mengelompok pada area yang memiliki tingkat intensitas aktivitas yang tinggi.

Kondisi pengunjung cenderung bersifat dinamis, artinya bahwa jumlah pengunjung setiap harinya tidak dapat dipastikan jumlahnya dan selalu mengalami perubahan setiap hari. Peningkatan jumlah pengunjung di Lapangan Niti Mandala Renon terjadi pada hari-hari tertentu seperti di hari sabtu dan minggu.

Keberadaan pengunjung di Lapangan Niti Mandala Renon selalu ramai pada hari minggu khususnya di pagi hari, hal ini menjadi keuntungan bagi para PKL untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak dari hari-hari biasa. Lapangan Niti Mandala Renon sendiri merupakan salah satu ruang terbuka publik yang sering dipakai untuk kegiatan atau event-event besar oleh berbagai kalangan sehingga memungkinkan banyak masyarakat yang datang. Selain itu Lapangan Niti Mandala Renon mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat yaitu adanya Monument Bajra Sandhi yang merupakan monument perjuangan rakyat Bali sehingga banyak wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Lapangan Niti Mandala Renon. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sastrawan (2015) tingkat kehadiran konsumen yang insidental menjadi permasalahan yang dihadapi PKL di Pantai Penimbangan.

Selain jumlah pengunjung yang tidak menentu, salah satu yang menjadi kendala PKL dalam melakukan aktivitas perdagangan adalah permodalan yang relatif kecil, hal ini

dikarenakan modal yang dikeluarkan berasal dari modal sendiri dan rata-rata modal yang mereka keluarkan kisaran Rp.300.000 sampai dengan Rp.500.000, dimana jumlah tersebut masih terbilang kurang memadai untuk peyediaan stok barang dagangan. Selain itu keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan biasanya sangat tipis sehingga PKL cenderung sulit untuk mengembangkan dagangannya.

Selanjutnya kendala yang dihadapi PKL adalah persaingan yang ketat antara sesama pedagang. Keberadaan PKL di suatu tempat cenderung berkelompok, artinya bahwa terdapat banyak PKL yang menempati suatu wilayah yang sama, hal ini secara tidak langsung menimbulkan persaingan diantara para pedagang. Seperti halnya yang terjadi di Kawasan Lapangan Niti Mandala Renon, dimana kehadiran PKL sangat banyak dijumpai dengan jenis dagangan yang sama. Penentuan jenis dagangan yang akan dijual oleh PKL sangat tergantung pada pemilihan lokasi berjualan, seperti di Lapangan Niti Mandala Renon dimana pedagang minuman dan makanan lebih mendominasi dari pada pedagang lainnya. Selain karena fungsinya sebagai ruang terbuka publik yang banyak dipergunakan oleh masyarakat untuk berolahraga, tetapi juga karena kawasan Niti Mandala Renon berdekatan dengan pusat pemerintahan Kota Denpasar dan kantor-kantor pemerintahan sehingga para pedagang lebih memilih berjualan minuman dan makanan di Kawasan Lapangan Niti Mandala Renon.

Komoditas yang diperjualbelikan sejenis (homogen) pada suatu kawasan

perdagangan secara tidak langsung akan berdampak pada besar kecilnya pendapatan yang didapatkan dan menimbulkan persaingan diantara pedagang, dimana kondisi ini memberikan konsumen lebih banyak pilihan sehingga peluang bagi pedagang yang lainnya menjadi semakin kecil. Rata-rata para PKL menjual jenis dagangan yang sama pada kawasan tertentu sehingga terkadang PKL mau tidak mau harus bersaing dengan sesama pedagang lainnya, adapun bentuk persaingan yang dilakukan oleh PKL yaitu dalam hal persaingan harga dan pesaingan dalam hal memberikan pelayanan kepada konsumen.

Kehadiran pedagang kaki lima tidak terlepas dari dampak positif dan negatif yang ditimbulkan. Kehadiran PKL muncul dari kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan masyarakat yang tidak merata sehingga kondisi ini mendorong mereka untuk memilih profesi sebagai pedagang kaki lima. Dilihat dari segi sosial dan ekonomi, kehadiran pedagang kaki lima secara tidak langsung berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pengangguran, selain itu dengan karakteristiknya yang cenderung mendekati keramaian aktivitas manusia, PKL menyediakan alternatif kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2004) bahwa kehadiran pedagang kaki lima menjadi salah satu faktor yang menentukan peningkatan jumlah pengunjung. Pernyataan yang mendukung juga disampaikan oleh Fatnawati (2013) bahwa kehadiran PKL memiliki kontribusi yang cukup besar

terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Beberapa permasalahan lingkungan yang timbul akibat kegiatan perdagangan kaki lima antara lain adalah masalah kebersihan, keindahan dan ketertiban umum. Keadaan ini pada satu sisi dianggap sebagai hal yang sangat mengganggu, namun di sisi yang lain, kegiatan pedagang kaki lima memberikan kontribusi yang besar dalam aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terutama golongan ekonomi menengah ke bawah.

Penurunan kualitas ruang suatu kota dilihat dari semakin tidak terkendalinya pertumbuhan PKL, dimana PKL menempati hampir disetiap sudut-sudut kota. Kehadiran pedagang kaki lima sering dikaitkan dengan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan perkotaan, keberadaannya yang tidak tertata dan tidak tertib menimbulkan kesan kotor dan kumuh terhadap lingkungan. Hal ini ditunjukkan dengan penempatan sarana perdagangan yang tidak teratur dan cenderung menempati tempat-tempat umum. Adapun bentuk sarana yang digunakan oleh PKL adalah bentuk sarana yang sederhana dan mudah dibawa atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain seperti; gerobak, keranjang, maupun meja semi permanen.

Kurangnya kesadaran pedagang akan kebersihan kota menyebabkan ruang publik menjadi kotor. Kehadiran PKL yang semakin tidak terkendali menyebabkan permasalahan tata ruang kota, dimana kemunculan PKL yang menempati ruang publik secara tidak langsung mengambil alih fungsi ruang publik yang seharusnya

digunakan oleh masyarakat untuk berkegiatan melainkan dipergunakan untuk tempat berjualan. Perencanaan tata ruang yang hanya terfokus pada ruang formal saja mendorong munculnya kegiatan perdagangan di sektor informal yaitu PKL.

Kegiatan sektor informal seperti pedagang kaki lima (PKL) yang tidak terwadahi dalam rencana kota yang resmi menyebabkan PKL menjadi sasaran utama untuk ditertibkan. Berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah kota dalam menekan jumlah PKL pada kenyataannya tidak dapat mengurangi jumlah PKL yang setiap tahunnya semakin bertambah. Permasalahan PKL menjadi beban berat pemerintah dalam penataan kota, kehadiran PKL sendiri membawa pengaruh yang besar terhadap kualitas ruang suatu kota. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatur PKL yaitu adanya relokasi atau pemindahan lokasi usaha PKL namun hal itu juga tidak dapat mengatasi permasalahan PKL secara tuntas.

Pemerintah Kota Denpasar telah berupaya dalam mengatur dan menata aktivitas PKL di kawasan Lapangan Niti Mandala Renon khususnya di hari minggu dengan dilakukannya relokasi atau pemindahan lokasi usaha PKL. Penataan PKL di Kawasan Renon setiap hari minggu memberikan perubahan yang positif terhadap kebersihan di Kawasan Lapangan Niti Mandala Renon, dimana para pedagang yang berjualan di tempat khusus PKL harus membayar uang kebersihan kepada pihak pengelola dengan jumlah tertentu.



Gambar 2 Pengamanan PKL oleh Pecalang Desa Adat Tanjung Bungkak.

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2019.

PKL yang telah terdaftar kepada pihak Pecalang Desa Adat Tanjung Bungkak dapat berjualan di lokasi mulai pukul 06.00 Wita sampai dengan pukul 10.00 Wita, apabila PKL berjualan lewat dari batas waktu yang ditentukan maka pihak Satpol PP akan melakukan penertiban terhadap para PKL yang masih berjualan di lokasi tersebut. Pecalang Desa Adat Tanjung Bungkak selalu berkoodinasi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintahan Kota Denpasar dalam hal penataan kebersihan di sepanjang kawasan PKL berjualan.

Selain masalah kebersihan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas PKL, salah satu dampak lainnya adalah kemacetan lalu lintas. Aktivitas PKL di Kawasan *Car Free Day* Renon terkadang menyebabkan arus lalu lintas menjadi macet, dimana pada pukul 06.00 Wita akses jalan akan ditutup bagi kendaraan, namun pada pukul 10.00 Wita akses jalan akan dibuka kembali untuk kendaraan dan aktivitas PKL harus dihentikan, namun terkadang pada pukul 10.00 Wita masih terdapat PKL yang tetap melakukan aktivitas di Kawasan Renon sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Aktivitas PKL di kawasan *Car Free Day* Renon mengakibatkan alih fungsi lahan ruang publik yang seharusnya dapat dipergunakan masyarakat untuk akses jalan namun menjadi tempat untuk berjualan bagi pedagang kaki lima. Kawasan Lapangan Niti Mandala Renon menjadi lokasi strategis bagi PKL untuk berjualan di hari minggu khususnya pagi hari, hal ini disebabkan terdapat banyak masyarakat yang berkunjung untuk mengabdikan waktu akhir pekan di kawasan *Car Free Day* Renon. Peningkatan jumlah PKL terjadi di setiap hari minggu dengan pola persebaran PKL yang dominan pada Bagian Barat Lapangan Niti Mandala Renon.

Dampak yang ditimbulkan dari adanya PKL tersebut dapat menjadi budaya yang berlangsung secara terus menerus. Generasi selanjutnya (anak dan cucu) dari para PKL tersebut akan memandang pekerjaan PKL sebagai hal yang positif karena menguntungkan mereka secara ekonomis, tanpa memandang adanya dampak negatif bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Hal ini akan menjadi semacam penanaman ego pribadi pada generasi selanjutnya. Lebih lanjutnya para PKL dan generasi yang melanjutkannya akan terjebak pada lingkaran PKL tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Amartya Sen tentang lingkaran setan kemiskinan atau *vicious circle of poverty*.

Hal yang menarik lagi bahwa terdapat pembagian kekuasaan atas PKL yang berjualan di Kawasan Lapangan Niti Mandala Renon. Kekuasaan tersebut terbagi dalam dua unsur stake holder yakni Desa Adat (pecalang), dan Pemerintah (Satpol PP dan

Dishub). Hal ini nampak seperti adanya dualitas kepentingan antara Adat dan Pemerintahan. Walau masih berjalan harmonis dengan adanya dualitas kepentingan tersebut, perlu dipikirkan cara terbaik untuk menghindari ada dikotomi atas kekuasaan ruang PKL yang dapat memunculkan dualisme kepentingan. Tentunya setiap komponen suatu wilayah harus berjalan harmonis dengan power yang berimbang, supaya tidak terjadi ketimpangan dalam pengurusan ruang wilayah, khususnya dalam konteks PKL.

Pembagian kekuasaan atas pengaturan PKL terbagi dalam tiga bagian ruang, yakni pada bagian barat oleh pecalang (penguasaan desa adat), kemudian pada bagian utara oleh Dishub dan bagian timur oleh Satpol PP (penguasaan pemerintah). Dishub dan Satpol PP melakukan pengamanan secara mobile dan berhak untuk menindak PKL pada bagian barat setelah jam 10.00 WITA. Hal ini mengartikan ada ruang atas waktu dari penguasaan pengaturan PKL. Ruang dan waktu menjadi posisi dualitas yang terjadi dalam penguasaan ruang dalam konteks PKL. Terciptanya ruang PKL tidak hanya karena faktor PKL saja, tetapi juga karena adanya faktor lain di luar PKL tersebut, yakni penguasa ruang atas waktu.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kehadiran PKL di Kawasan Lapangan Niti Mandala Renon telah berhasil memproduksi ruang sosial. Produksi ruang PKL di Lapangan Niti Mandala Renon terbentuk dari

adanya tindakan resistensi yang dilakukan oleh PKL terhadap peraturan daerah dimana para PKL terus berusaha untuk tetap berjualan walaupun sudah dilarang. Proses bersosialisasi, interaksi, terus terjadi diantara para PKL sehingga terbentuknya zona ruang. Proses bersosialisasi pada awalnya dilakukan oleh sesama PKL. Sosialisasi tersebut kemudian berlangsung secara intensif dan terus menerus sehingga terbentuklah interaksi yang kuat antar sesama PKL hingga akhirnya membentuk zona ruang. Zona ruang PKL tersebut semakin kuat hingga membentuk kekuasaan (*power*) tersendiri. Walaupun terlihat abstrak, namun kekuatan penguasaan ruang oleh PKL tersebut nyata adanya dan terlihat dari semakin kerasnya usaha pemerintah (dalam hal ini adalah Satpol PP) untuk menertibkan para PKL. Inilah yang disebut sebagai ruang abstrak oleh Lefebvre.

Proses produksi ruang yang dilakukan oleh PKL di Lapangan Niti Mandala Renon memiliki beberapa hambatan, seperti adanya kendala izin tempat, kendala sedikitnya jumlah pengunjung dan kendala permodalan yang relatif kecil serta kendala persaingan antara pedagang lainnya. Kehadiran pedagang kaki lima tidak terlepas dari dampak positif dan negatif yang ditimbulkan. Adapun dampak positif yang ditimbulkan adalah dilihat dari segi sosial dan ekonomi, kehadiran PKL secara tidak langsung berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pengangguran, sedangkan dampak negatif dari kehadiran PKL di Lapangan Niti Mandala Renon, yakni munculnya masalah kebersihan lingkungan yang berawal dari

kurangnya kesadaran pedagang akan kebersihan kota menyebabkan ruang publik menjadi kotor dan dampak lainnya yakni timbulnya alih fungsi lahan, dimana ruang publik yang seharusnya dapat digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas justru digunakan PKL sebagai tempat untuk berjualan. Dampak ketiga yang ditimbulkan dari aktivitas PKL adalah kemacetan lalu lintas.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Jamaludin, Adon, A. (2015). *Sosiologi Perkotaan, Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*. Bandung: Pustaka Setia.

Lavebre, Henri. *The Production of Space*. Terjemahan oleh Donald Nicholson-Smith, 1991. Brasil Blackwell: Oxford.

Ritzer, George. (2014). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.

Ambrose, P. 2003. *Urban Process And Power*. New york: Routledge.

Skripsi dan Tesis :

Dwiyanti, Yanivirzal. (2005). *Kajian Pola Ruang PKL dan Karakteristik Aktivasnya di Kawasan Panbil Kota Batam*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.

Candra, Tanti. (2016). *Produksi Ruang Sosial Melalui Mural di*

Kota Denpasar. *Skripsi*. Denpasar:
Universitas Udayana.

Fatmawati, N. 2013. Dampak Relokasi
PKL Berdasarkan Peraturan Daerah

Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki
Lima Terhadap Usaha Pedagang
Kaki Lima Di Surakarta. *Skripsi*.
Universitas Negeri Semarang.

Jurnal :

Setiawan, A. (2016). *Produksi Ruang
Sosial Sebagai Konsep
Pengembangan Ruang
Perkotaan (Kajian atas Teori
Ruang Henri Lefebvre)*. Haluan
Sastra Budaya. Diakses dari
<http://www.academia.edu/download/54791192/4244-7704-1-SM.pdf>.

Sastrawan, I Wayan. 2015. Analisis
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Pemilihan Lokasi Usaha
Pedagang Kaki Lima Di Pantai
Penimbangan Kecamatan
Buleleng, Kabupaten Buleleng.
Jurnal Pendidikan Ekonomi
Undiksha. Tersedia pada
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/viewFile/5084/3839>.

Ginting, Salmina, W. (2004). Studi kasus:
pengaruh keberadaan pedagang
kaki lima terhadap jumlah
pengunjung taman Kota di
Mendan. *Jurnal Teknik Semetrika*,
3 (3).